

KAJIAN STRATEGI OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN HUTAN RAKYAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Study on Optimisation Strategy of Private Forest Land Utilization in South Sulawesi)

Achmad Rizal HB¹, Nurhaedah², Evita Hapsari³

^{1,2,3}BPK Makassar, Jln. Perintis Kemerdekaan KM 16,5 Makassar, tlp (0411) 554049, fax (0411) 554058, e-mail: arhbisjoe@yahoo.com

Diterima 17 September 2012, disetujui 13 November 2012

ABSTRACT

South Sulawesi has private forest of 223,428 hectares or 7.40% of its forest total area. Optimal utilization of this potency through agroforestry is common to some districts in South Sulawesi. Research's location is purposively defined based on private forest potency and its practiced agroforestry, i.e. in District of Barru, Bulukumba, and Sidrap. Data was collected through discussion, interview, observation, potency assessment, study of related literature. The objective of the research is to formulate the optimization strategy on land utilization under the stands of private forest in food security supporting. It is a conclusive research with a descriptive study approach. Force Field Analysis (FFA) was applied to formulate the optimization strategy. The result showed that private forest management in those three districts facing some issues. There are some driving factors and some restraining ones, both internally and externally affecting that private forest management in "growth" category. The recommended alternative strategy is concentration through horizontal integrated. This strategy is part of the growth strategy and can be done by expanding the activities with the community and developing information and communication networking with other districts that have same program.

Keywords: optimization, private forest, growth, strategy

ABSTRAK

Sulawesi Selatan memiliki luasan hutan rakyat sebesar 223.428 ha (7,40% dari kawasan hutannya). Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan penerapan pola agroforestri yang mudah dijumpai di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif dengan memperhatikan potensi hutan rakyat dan praktik agroforestri, yakni di Kabupaten Barru, Bulukumba, dan Sidrap. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi, wawancara, observasi, pengukuran potensi, dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat untuk mendukung ketahanan pangan. Penelitian bersifat konklusif dengan pendekatan studi deskriptif. Untuk merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan, digunakan analisis medan daya (*Force Field Analysis* = FFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan rakyat di ketiga kabupaten berhadapan dengan sejumlah isu, yang ditunjukkan oleh adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat, baik internal maupun eksternal. Pengelolaan dimaksud berada pada kategori "growth". Strategi yang sesuai adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal dengan cara memperluas kegiatan di masyarakat dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi antardaerah yang memiliki program yang sama.

Kata kunci: optimalisasi, hutan rakyat, growth, strategi

I. PENDAHULUAN

Hutan rakyat sudah berkembang sejak lama di kalangan masyarakat Indonesia, dan dikelola secara tradisional oleh pemiliknya. Pengelolaan hutan rakyat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri secara swadaya murni tanpa campur tangan pemerintah, baik secara monokultur maupun pola tanam campuran dengan sistem agroforestri (Usman, 2001). Selanjutnya, Usman (2001) melaporkan luas hutan rakyat di Indonesia mencapai 1,3 juta hektar pada tahun 1999 dengan jenis-jenis tanaman yang telah akrab dengan masyarakat. Hutan rakyat selain menghasilkan kayu juga non kayu seperti buah-buahan, getah, dan hasil-hasil lainnya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat mendukung ketahanan pangan.

Pada optimalisasi penggunaan lahan hutan rakyat terdapat peluang untuk menerapkan pola agroforestri yang merupakan suatu sistem pengelolaan lahan berdasarkan kelestarian. Pola agroforestri yang mengkombinasikan produksi tanaman pertanian dan tanaman hutan dan/atau hewan, secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama dapat meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan.

Kawasan hutan rakyat di Sulawesi Selatan cukup besar, yaitu 223.428 ha atau 7,40% dari kawasan hutannya (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2004). Luasan tersebut merupakan 17,19% dari luas seluruh hutan rakyat di Indonesia. Lahan hutan rakyat tersebut belum dimanfaatkan secara optimal bila dilihat dari pengaturan komposisi jenis tanamannya. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknik budidaya seperti pengaturan pola tanam, jarak tanam dan pemilihan jenis tanaman.

Pola agroforestri adalah campuran komposisi tanaman jangka pendek berupa tanaman semusim, jangka menengah berupa tanaman sela, dan jangka panjang berupa tanaman kehutanan. Dengan menerapkan pola tersebut, pendapatan masyarakat dapat meningkat melalui perolehan hasil dari tanaman.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Barru, Bulukumba, dan Sidrap.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Barru, Bulukumba dan Sidrap, Sulawesi Selatan dan berlangsung pada Januari sampai Desember 2009.

B. Bahan dan Alat

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: alat tulis-menulis, alat perekam, kuesioner, kamera, dan perlengkapan lapang.

C. Metode Pengambilan Sampel

Lokasi kabupaten dipilih secara purposif berdasarkan luasan hutan rakyatnya. Responden/informan dari masyarakat dipilih secara purposif berdasarkan luas pemilikan hutan rakyat dan potensi tanaman didalamnya.

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi, yaitu melihat dan mengamati karakteristik responden yang memiliki luas dan potensi tanaman hutan rakyat secara langsung sehingga dapat diketahui kondisi objek yang akan diamati dan diambil datanya.
2. Studi literatur, yaitu mengkaji berbagai informasi seperti literatur dan teori yang berkaitan data yang menunjang penelitian ini.
3. Wawancara dan pengisian kuisisioner, yaitu pengumpulan fakta dan data dengan cara melakukan wawancara secara intensif dengan responden. Jumlah responden disetiap desa sampel antara 5-10 orang.

D. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan digunakan analisis medan daya (*Force Field Analysis*) dari Kurt Lewin, yang dikembangkan oleh Morgan (2008) dan secara partisipatif telah diterapkan oleh Singer (2009) dalam suatu analisis kekuatan-kekuatan yang mendukung dan yang menghambat terwujudnya perubahan. Selanjutnya, Singer (2009) mengemukakan langkah-langkah analisis, sebagai berikut:

1. Menuliskan semua faktor pendorong terjadinya perubahan pada sisi kiri kertas.
2. Menuliskan semua faktor penghambat terjadinya perubahan pada sisi kanannya.
3. Memberikan nilai setiap faktor pendorong dan penghambat 1 -5, di mana 1 = paling lemah pengaruhnya sampai dengan 5 = paling kuat pengaruhnya.
4. Menjumlahkan nilai masing-masing faktor secara terpisah untuk keperluan analisis cepat terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat.
5. Membentuk kelompok (terdiri dari 3 - 4 orang) untuk mendiskusikan cara memperkuat faktor pendorong terjadinya perubahan dan cara meminimalkan faktor penghambat terjadinya perubahan.

Analisis medan daya disingkat FFA bertujuan memberikan gambaran permasalahan dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diubah dan memberikan analisis tentang cara menghapuskan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan.

Untuk mengetahui posisi progres strategi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat, dilakukan analisis faktor strategis internal dan eksternal. Analisis faktor strategis internal (*internal strategic factors analysis summary = IFAS*) merupakan prosedur pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal. Sedangkan analisis faktor strategi eksternal (*external strategic factors analysis summary = EFAS*) merupakan prosedur pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan eksternal. Penilaian terhadap faktor internal dan eksternal dilakukan dengan memberikan pembobotan dan peringkat pada setiap faktor strategis dalam suatu tampilan tabel (Tabel IFAS EFAS), menurut langkah-langkah sebagai berikut (lihat Lampiran 1).

1. Memasukkan faktor-faktor internal dan eksternal pada Tabel IFAS-EFAS kolom 1.
2. Memberikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom 2, dengan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1,00. Faktor-faktor itu diberi bobot berdasarkan pengaruh posisi strategis.
3. Memberikan peringkat pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi bersangkutan.

4. Mengalikan bobot dengan peringkat untuk memperoleh nilai masing-masing faktor.
5. Menjumlahkan nilai masing-masing faktor (pada kolom 4). Nilai total ini menunjukkan Nilai IFAS/EFAS, yang antara lain digunakan dalam penentuan posisi program pada Matriks Internal Eksternal dari Wheelen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Hutan Rakyat di Kabupaten Barru, Bulukumba, dan Sidrap

Kawasan hutan di Kabupaten Sidrap seluas 75.135 ha adalah yang paling luas dibanding Kabupaten Barru seluas 4.867 ha dan Kabupaten Bulukumba seluas 30.726 ha. Namun, persentase luas hutan rakyat di Kabupaten Sidrap paling rendah, yaitu 8,4% dibanding Kabupaten Barru 82% dan Kabupaten Bulukumba 72%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan lahan hutan rakyat di Kabupaten Sidrap masih rendah. Masyarakat petani di Kabupaten Barru dan Kabupaten Bulukumba memanfaatkan sebagian besar lahannya untuk hutan rakyat. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahannya cukup tinggi, sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan tercapai.

Hutan rakyat di Kabupaten Barru didominasi tanaman jati (*Tectona grandis*) dengan umur pohon \pm 10 tahun, volume rata-rata 4 m³/ha (kerapatan 226 pohon/ha). Luas areal hutan yang dikelola masyarakat berkisar antara 0,3 - 3 ha, dengan pohon berumur \pm 10 tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk pertumbuhan tanaman bawah/sela karena tutupan tajuk sudah menghalangi cahaya matahari.

Hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba didominasi oleh tanaman sengon (*Paraserianthes falcataria*) yang berumur antara 5 - 10 tahun dengan volume rata-rata 57 m³/ha (kerapatan 126 pohon/ha). Pada lahan ini masyarakat menanam berbagai jenis tanaman perkebunan dan buah-buahan, sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal di banding daerah lain.

Di Kabupaten Sidrap hutan rakyat didominasi oleh jenis tanaman mahoni (*Swietenia macrophylla*) yang berumur rata-rata 4 tahun dengan volume rata-rata 47 m³/ha (kerapatan 400 pohon/ha) dan

jati (*Tectona grandis*) yang berumur rata-rata 7 tahun dengan volume 4 m³/ha (kerapatan 380 pohon/ha). Di bawah tegakan mahoni masyarakat menanam jagung sebagai sumber penghasilan alternatif sebelum panen kayu, tetapi di bawah tegakan tanaman jati tidak dijumpai ada tanaman sela.

Berdasarkan kajian pada lokasi yang disurvei, ke tiga kabupaten masih memiliki potensi hutan rakyat untuk berkembang, karena adanya dukungan pemerintah setempat, baik teknis maupun non teknis. Kesadaran masyarakat untuk menanam pohon bukan sekedar tuntutan ekonomi, tetapi memiliki fungsi pelestarian lingkungan serta permintaan pasar akan kebutuhan kayu. Pemilihan jenis tanaman untuk dikembangkan didasarkan pada kesesuaian lahan, permintaan, dan ketersediaan pasar.

Hutan rakyat yang dikaji umumnya dikelola masyarakat secara swadaya, baik secara individu maupun secara kelompok, kecuali di Kabupaten Bulukumba dikembangkan dengan pola kemitraan, yaitu: masyarakat, perusahaan kayu, dan pemerintah. Masyarakat sebagai pemilik lahan berperan sebagai penyedia bahan baku kayu untuk perusahaan, selanjutnya perusahaan berperan sebagai penyedia bibit dan pengguna hasil kayu, sedangkan pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia bimbingan teknis.

B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Petani Hutan Rakyat

Karakteristik petani hutan rakyat di Kabupaten Barru, Bulukumba, dan Sidrap secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik petani hutan rakyat di Kabupaten Barru, Bulukumba, dan Sidrap

Table 1. Characteristic of private forest farmer in Barru, Bulukumba, and Sidrap

Lokasi <i>Location</i>	Umur (tahun) <i>Age (year)</i>	Pendidikan (Education)	Pekerjaan (Occupation)	Jumlah Tanggungan <i>(Number of family)</i>	Luas Lahan (ha) <i>(Land area, hectares)</i>		
					Sawah <i>(farm)</i>	Kebun <i>(garden)</i>	Hutan <i>(forest)</i>
Kabupaten Barru	29 -65	SD - S1	- Bertani - Beternak, Swasta	1 - 5	0,5 - 3	0,1 - 2	0,3 - 3
Kabupaten Bulukumba	24 - 70	SD - S1	- Bertani, PNS - Berdagang, Buruh	1 - 6	0,35 - 1	0,5 - 3	0,5 - 3
Kabupaten Sidrap	24 - 79	SD - SMA	- Bertani, - Wiraswasta - Berkebun	1 - 6	0,7 - 5	0,5 - 7	0,5 - 10

Sumber : Data Primer diolah, 2009

Source : Primary Data processed, 2009

Pada Tabel 1, ditunjukkan bahwa usia responden tergolong usia produktif hingga tidak produktif. Usia produktif merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan suatu daerah. Pada umumnya masyarakat yang berusia produktif memiliki kondisi fisik yang prima serta mudah menerima ide-ide baru atau inovasi. Sedangkan masyarakat yang berada dalam kategori usia non produktif, walaupun secara fisik terbatas, tetapi pengetahuan dan pengalaman mereka dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan suatu daerah. Usia produktif dan usia non produktif

menjadi faktor pendukung dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan rakyat.

Tingkat pendidikan masyarakat dalam Tabel 1 terlihat cukup tinggi walaupun ada beberapa orang yang mempunyai pendidikan rendah. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam menganalisis suatu masalah dan mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan memiliki kecenderungan semakin mudah menerima respon terhadap perubahan-perubahan. Hal ini menjadi faktor

pendukung masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang mereka miliki agar bisa lebih optimal.

Mayoritas responden di tiga kabupaten memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan hutan rakyat. Petani sudah mengetahui teknik-teknik bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi di daerahnya berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Akan tetapi, mereka tetap membutuhkan pembinaan, pengarahan, dan pelatihan agar dapat memanfaatkan lahan secara lebih optimal, khususnya pemanfaatan hutan rakyat secara optimal, sehingga produktivitas meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lahan. Selain bertani, mereka memiliki pekerjaan sampingan seperti beternak. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutannya, masyarakat dapat menggabungkan tanaman perkebunan dan tanaman hutan atau menanam rumput gajah untuk pakan ternak. Berternak di lahan hutan merupakan bagian dari bentuk agroforestri, yaitu silvopastur.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah tanggungan kepala keluarga pada tiga kabupaten cukup besar, yakni mencapai 5 - 6 orang/keluarga. Hal ini akan mempengaruhi motivasi dan kreativitas seorang kepala keluarga, karena semakin banyak jumlah orang yang ditanggung semakin besar biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan lahan hutan rakyat untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan. Hasil yang diperoleh dalam jangka pendek adalah tanaman semusim, sumber pendapatan jangka menengah adalah tanaman sela, serta sumber pendapatan jangka panjang adalah tanaman kehutanan.

Kepemilikan sawah oleh masyarakat di Kabupaten Sidrap merupakan yang terluas, yaitu 0,7 - 5 ha/keluarga, dibanding Kabupaten Barru (0,5 - 3 ha/keluarga) dan Kabupaten Bulukumba (0,35 - 1 ha/keluarga). Demikian halnya dengan kepemilikan lahan kebun dan hutan. Kabupaten Sidrap merupakan salah satu sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan dan penghasil jagung yang diolah menjadi pakan ternak. Masyarakat di kabupaten ini cukup optimal memanfaatkan lahan hutannya.

Pendapatan petani dari tanaman kehutanan pada tiga lokasi kajian, menunjukkan bahwa Kabupaten

Barru memiliki pendapatan yang paling tinggi, yaitu Rp 3.000.000 - Rp 40.000.000/tahun, dibanding dengan Kabupaten Sidrap (Rp 4.500.000 - Rp 24.000.000/tahun) dan Kabupaten Bulukumba (Rp. 2.000.000 - Rp. 22.500.000/tahun). Di Kabupaten Barru, tanaman kehutanan di dominasi oleh tanaman jati yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena harga jualnya yang mahal, baik di pasar lokal maupun nasional (Koran Jakarta, 2009). Kayu jati digunakan sebagai bahan baku pembuatan meubel dan bahan bangunan rumah. Hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba didominasi oleh tanaman sengon yang memiliki prospek pasar, karena adanya perusahaan *veneer* (bahan kayu lapis) berskala nasional di kabupaten tersebut yang membeli kayu rakyat. Sedangkan di Kabupaten Sidrap didominasi jenis tanaman mahoni dan jati. Harga tanaman mahoni yang berumur 7 tahun adalah Rp 500.000/pohon, sedangkan harga tanaman jati berumur 15 tahun adalah Rp 2.000.000/pohon. Tanaman yang dimiliki masyarakat masih berusia antara 4 - 5 tahun, tetapi ada jaminan pasar ke depan, karena pengusaha meubel yang ada di daerah ini masih kekurangan bahan baku.

Pendapatan petani dari sektor perkebunan pada tiga lokasi kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki pendapatan tertinggi (Rp 280.000 - Rp 36.000.000/tahun) dibanding Kabupaten Barru (Rp. 800.000 - Rp. 1.800.000/tahun) dan Kabupaten Sidrap (Rp. 500.000 - Rp. 27.000.000/tahun). Hal ini di dukung oleh adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan (2005 - 2010) yang bertujuan mewujudkan pembangunan kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mencakup peningkatan mutu dan produktivitas sumber daya hutan (SDH) dan lahan, penurunan laju degradasi SDH dan lahan, terselenggaranya sistem pengelolaan hutan dan lahan secara adil, dan peningkatan kontribusi hutan dan lahan terhadap perekonomian nasional dan daerah, serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dari kebijakan ini terdapat 4 (empat) program besar, yaitu: (1) Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan, (2) Perlindungan hutan, pengamanan hutan dan konservasi alam, (3) Optimalisasi fungsi, pemanfaatan fungsi dan pemanfaatan hutan serta lahan, dan (4) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Pada program 3, terdapat kegiatan

intensifikasi tumpangsari/agroforestri, sehingga merubah paradigma pengelolaan hutan dari yang berorientasi pada hasil kayu saja, menjadi hasil hutan non kayu, baik berupa hasil perkebunan maupun pertanian. Kondisi tersebut memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam mengurangi ketergantungan pada hasil kayu saja, tetapi dapat menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari tanaman semusim.

Pendapatan petani dari sektor tanaman pangan pada tiga lokasi kajian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Barru (Rp 3.000.000 - Rp 39.000.000/tahun) lebih tinggi dibanding Kabupaten Sidrap (Rp 2.000.000 - Rp 18.000.000/tahun) dan Kabupaten Bulukumba (Rp. 800.000 - Rp. 6.600.000/tahun). Pada umumnya masyarakat di wilayah ini memiliki pekerjaan utama sebagai petani sawah yang didukung oleh ketersediaan irigasi dan keberadaan stasiun perbenihan/pembibitan padi Bottolampe di Kecamatan Tanete Riaja. Hal ini berdampak pada peningkatan ketersediaan dan penggunaan benih padi bermutu, sehingga akan meningkatkan pendapatan petani (Dinas Komunikasi Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barru, 2006).

Total pendapatan petani dari hutan rakyat pada tiga lokasi kajian dapat mencapai kisaran Rp 65.000.000 - Rp 79.000.000/tahun, jika pada lahan yang mereka kelola diusahakan beberapa komoditi

baik tanaman kehutanan, perkebunan maupun tanaman pangan. Hal ini seiring dengan pemahaman optimalisasi menurut Andayani (2002), yaitu memaksimalkan nilai finansial atas sebidang lahan usaha dengan kombinasi jenis tanaman yang secara agregat menghasilkan nilai ekonomi maksimum. Di samping itu, optimalisasi lahan memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, sehingga dapat mencapai di atas rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan, yaitu sebesar Rp 905.000/bulan (Edwin, 2008).

C. Beberapa Faktor Pendukung dalam Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat

Hasil wawancara dan diskusi dengan parapihak, disepakati adanya beberapa faktor dalam program optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat. Faktor-faktor tersebut yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (*private sector*) dengan cakupan yang luas meliputi regulasi, program instansi, kapasitas pelaku, status dan daya dukung lahan, akses pasar, pola tanam, kelembagaan, permintaan dan persediaan komoditas, ketahanan pangan, potensi konflik, dan sebagainya. Selanjutnya, secara partisipatif faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam faktor pendorong dan faktor penghambat, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor-faktor dalam optimalisasi lahan di bawah tegakan hutan rakyat
Table 2. Factors in land optimization under private forest's stands

Faktor Pendorong (Driving Factors)	Faktor Penghambat (Restraining Factors)
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program pengembangan hutan rakyat - Adanya hutan rakyat Model Kementerian Kehutanan - Adanya petani sukses sebagai pelopor - Tersedianya lahan hutan rakyat dan alokasi lahan untuk hutan rakyat - Tersedianya pasar untuk hasil-hasil hutan rakyat - Motivasi ekonomi dan ekologi masyarakat - Hak kepemilikan yang jelas - Adanya kelembagaan masyarakat - Meningkatnya permintaan kayu lokal hutan rakyat - Adanya contoh sukses hutan rakyat desa teladan - Permintaan pakan ternak meningkat - Kemungkinan pemanfaatan lahan eks HGU - Berkembangnya industri rakyat berbasis kayu - Respon pemda terhdap isu kelangkaan pangan dengan pengembangan usaha tani di hutan rakyat - Digagasnya perda tentang hutan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pendampingan teknis dalam pengelolaan hutan rakyat - Kurangnya koordinasi antara instansi terkait - Masyarakat terbiasa dengan monokultur - Kondisi lahan hutan rakyat yang beragam - Rendahnya margin pendapatan petani - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya tanaman - Kurangnya modal masyarakat - Inkonsistensi minat masyarakat terhadap komoditi yang sedang “booming” - Potensi konflik tata batas hutan rakyat dan hutan lindung - Konversi penggunaan lahan - Serangan hama dan penyakit

Sumber : Data Primer diolah, 2009
Source : Primary Data processed, 2009)

Pada Tabel 2 dicantumkan faktor-faktor pendorong yang mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat di Dinas Kehutanan masing-masing kabupaten, melalui program pengembangan hutan rakyat. Hal ini sejalan dengan model hutan rakyat yang dikembangkan oleh Departemen Kehutanan di Kabupaten Barru. Model tersebut memperkenalkan kombinasi tanaman kehutanan mahoni, *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) seperti kemiri dengan tanaman obat/rempah-rempah seperti jahe. Hutan rakyat di Kabupaten Barru yang didominasi tanaman jati yang tumbuh alami, kurang memungkinkan tanaman tumbuh di bawahnya, sehingga kurang diminati masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan lahan yang banyak dijumpai di Kabupaten Barru hanya berupa penanaman rumput gajah dan gamal pada tepi-tepi lahan yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Faktor-faktor pendorong sebagian besar berasal dari masyarakat sebagai pemilik lahan. Oleh karena itu, motivasi masyarakat, baik ekonomi maupun ekologi, perlu terus dipelihara dan dikembangkan agar tetap mempertahankan keberadaan kawasan hutan rakyat. Selain pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah, hal yang dapat mempercepat pelaksanaan program di hutan rakyat adalah kepeloporan petani yang sukses mengembangkan hutannya. Hal ini dijumpai di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bulukumba. Di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, ketua kelompok tani telah memelopori penanaman mahoni yang diselanya ditanami jagung. Kedua jenis tanaman ini telah mempunyai pasar, yakni kayu mahoni (pohonnya saat penelitian berlangsung berumur 4 tahun) yang akan dibeli oleh industri pengolahan kayu *lumpersery* yang berada di Desa Puncak Mario yang juga milik ketua

kelompok. Sedangkan hasil panen jagung dibeli oleh industri pengolah pakan ternak di Kabupaten Sidrap. Selain itu, dikembangkan juga embung-embung sebagai tempat persediaan air dan pembiakan ikan air tawar pada cekungan hamparan lahan. Prestasi yang dicapai oleh ketua kelompok tani telah mendorong anggota kelompok untuk mengembangkan hal serupa di lahan masing-masing, terutama karena adanya keterjaminan pasar. Saat ini di Kecamatan Kulo terdapat tegakan mahoni dengan jagung sebagai tanaman sela, tegakan jati, dan gmelina yang seluruhnya mencapai luasan 50 hektar. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan dan Program Evaluasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sidrap, lahan untuk tanaman kehutanan tersebut memungkinkan untuk dikembangkan, mengingat adanya potensi eks lahan HGU perkebunan yang terlantar setelah perusahaan pengelolanya berhenti beroperasi.

Kepeloporan serupa juga dijumpai di Kabupaten Bulukumba, Desa Balangtaroang dan Desa Sapobonto. Pengembangan pola agroforestri sebagai bentuk pemanfaatan lahan hutan rakyat telah mengantarkan kepala desanya sebagai kepala desa teladan nasional 2009 dan mendapat undangan untuk hadir di Istana Negara dalam upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pola agroforestri yang dikembangkan adalah kombinasi jenis tanaman kehutanan, seperti suren, sengon, bitti, dan mahoni dengan tanaman jenis buah-buahan, seperti durian, rambutan, nangka, yang diselingi tanaman sela, seperti kakao, pisang, dan kopi. Kawasan hutan rakyat tersebut berbatasan areal persawahan, yang batas pematangnya ditanami rumput gajah, untuk pakan ternak yang dikembangkan dengan sistem kandang. Hasil kayu dari hutan rakyat ditampung oleh industri pengolahan kayu di Kabupaten Bulukumba, di samping juga diolah sendiri oleh warga setempat untuk usaha meubel. Hasil wawancara dengan kepala desa mengungkapkan pengembangan desa mengarah kepada wisata agro, yang saat ini dalam tahap pembangunan infrastruktur, seperti gedung pertemuan, *guest house*, sarana pemandian umum, dan sarana penunjang lainnya. Adapun kepeloporan di Desa Sapobonto bermula dari rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis di sekitar desa melalui program UPSA (Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam) pada tahun 1991.

Seorang ketua kelompok tani adalah salah satu pekerja dalam program tersebut, berinisiatif mengembangkan program UPSA di lahan miliknya. Pada saat program UPSA berakhir, petani tersebut akan menikmati hasil dari tanaman yang dikembangkan di lahannya. Pola agroforestri yang dikembangkan dengan perlakuan terasering pada lahan kelerengan, telah menunjukkan hasil berupa tanaman campuran kehutanan seperti sengon, bitti, gmelina, suren, dan akasia, dengan tanaman buah-buahan seperti langsung, manggis, mangga, dan nangka. Tanaman selanya terdiri dari kakao, cengkeh, dan merica dengan menggunakan gamal sebagai tanaman penunjang. Sedangkan pada sepanjang batas masing-masing teras ditanami rumput gajah. Upaya yang dilakukan ketua kelompok tersebut telah diikuti oleh anggotanya, dan telah menjadikan desanya sebagai sumber buah-buahan dan sayur-mayur. Selanjutnya, oleh penyuluh lapang, keberhasilan di Desa Sapobonto ditularkan kepada desa di sekitarnya. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh, diketahui bahwa faktor pendorong utama suksesnya penghijauan di tingkat kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya, yakni Kecamatan Bulukumba adalah inisiatif masyarakat sebagai pemilik lahan untuk mengikuti arahan dari instansi terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah terbatasnya jumlah penyuluh kehutanan dan kesediaan penyuluh untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan contoh langsung di lapang.

Keberadaan penyuluh yang dibekali pengetahuan teknis dan pengalaman berkomunikasi dengan masyarakat, perlu ditingkatkan. Hal ini memiliki nilai strategis dalam memantau pengelolaan hutan rakyat, mengingat sebagai lahan milik, masyarakat dapat sewaktu-waktu mengganti tanaman yang ada dengan jenis tanaman lainnya, yang lebih menguntungkan atau bahkan mengalihkan fungsi lahannya dengan alasan kebutuhan finansial. Dalam hal ini diperlukan kebijakan insentif dan pendekatan persuasif agar masyarakat tetap mengelola hutan miliknya, baik dengan pertimbangan ekonomi maupun ekologi.

1. Analisis Faktor Strategis Eksternal dan Internal

Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang telah dipaparkan terhadap optimalisasi peman-

faatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat, maka dilakukan analisis EFAS dan IFAS. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3. Faktor-faktor yang termasuk kategori peluang dan ancaman digabungkan sebagai faktor strategis eksternal dan melalui diskusi masing-masing faktor ditentukan bobotnya atau porsinya terhadap keseluruhan. Misalnya dalam kasus ini terdapat 11 faktor, apakah bobot atau porsi faktor merupakan 1/11, 2/11, atau 3/11 dan seterusnya dari keseluruhan faktor. Selanjutnya, bobot dinyatakan dalam desimal. Sedangkan peringkat ditentukan berdasarkan tingkat pengaruh faktor terhadap program yang dikembangkan. Dalam kasus ini digunakan 4 peringkat, yakni 1 mewakili lemah, 2 rata-rata, 3

kuat, dan 4 sangat kuat. Peringkat ditentukan melalui diskusi, yang merupakan pertimbangan profesional (*professional judgement*). Untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor, bobot dikalikan dengan peringkatnya. Selanjutnya, dijumlahkan nilai masing-masing faktor untuk memperoleh nilai EFAS. Sebagaimana prosedur dalam memperoleh nilai EFAS, demikian halnya untuk analisis IFAS, yang hasilnya disajikan pada Tabel 4. Jika biaya dan waktu cukup tersedia, dimungkinkan untuk melakukan diskusi dengan melibatkan parapihak dalam menyepakati faktor-faktor pengaruh eksternal dan internal dalam hal jumlah, bobot, dan peringkatnya.

Tabel 3. Ikhtisar analisis faktor strategis eksternal
Table 3. External strategic factors analysis summary (EFAS)

Faktor-faktor Strategis Eksternal (<i>External Strategic Factors</i>)	Bobot (<i>Quality</i>)	Peringkat (<i>Ranking</i>)	Nilai (<i>Score</i>)
Peluang			
- Meningkatnya permintaan kayu lokal hutan rakyat	0.16	4	0.64
- Adanya contoh sukses hutan rakyat desa teladan	0.18	3	0.54
- Permintaan pakan ternak meningkat	0.03	1	0.03
- Kemungkinan pemanfaatan lahan eks HGU	0.05	2	0.10
- Berkembangnya industri rakyat berbasis kayu	0.12	4	0.48
- Adanya respon pemda terhadap isu kelangkaan pangan	0.08	2	0.16
- Digagasnya Perda tentang hutan rakyat	0.11	3	0.33
Ancaman			
- Inkonsistensi minat masyarakat terhadap suatu komoditi	0.05	2	0.10
- Potensi konflik tata batas hutan rakyat dan hutan lindung	0.11	4	0.44
- Konversi penggunaan lahan	0.08	3	0.24
- Serangan hama dan penyakit	0.03	2	0.06
Jumlah (<i>Total</i>)	1.00		3.12

Sumber : Data Primer diolah, 2009
Source : Primary Data processed, 2009

Tabel 4. Ikhtisar analisis faktor strategis internal
Table 4. Internal strategic factors analysis summary (IFAS)

Faktor-faktor Strategis Internal (Internal Strategic Factors)	Bobot (Quality)	Peringkat (Ranking)	Nilai (Score)
Kekuatan			
- Adanya program pengembangan hutan rakyat	0.11	3	0.33
- Adanya hutan rakyat Model Kementerian Kehutanan	0.09	3	0.27
- Adanya petani sukses sebagai pelopor	0.08	3	0.24
- Tersedianya lahan hutan rakyat dan alokasi lahan untuk hutan rakyat	0.06	2	0.12
- Tersedianya pasar untuk hasil-hasil hutan rakyat	0.12	4	0.48
- Motivasi ekonomi dan ekologi masyarakat	0.05	2	0.10
- Hak kepemilikan yang jelas	0.02	2	0.04
- Adanya kelembagaan masyarakat	0.03	2	0.06
Kelemahan			
- Kurangnya pendampingan teknis dalam pengelolaan hutan rakyat	0.11	4	0.44
- Kurangnya koordinasi antara instansi terkait	0.09	3	0.27
- Masyarakat terbiasa dengan monokultur	0.03	2	0.06
- Kondisi lahan hutan rakyat yang beragam	0.02	1	0.02
- Rendahnya margin pendapatan petani	0.06	3	0.18
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya tanaman	0.08	2	0.16
- Kurangnya modal masyarakat	0.05	2	0.10
Jumlah (Total)	1.00		2.87

Sumber : Data Primer diolah, 2009

Source : Primary Data processed, 2009)

Berdasarkan model matriks internal-eksternal dari Wheelen (1995) dalam Rangkuti (2008) yang disajikan pada Lampiran 1, dengan jumlah nilai IFAS = 2,87 dan nilai EFAS = 3,12 ; optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat, berada pada kategori “*growth*”, maka strategi yang sesuai adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Strategi ini termasuk dalam strategi pertumbuhan dengan cara memperluas kegiatan masyarakat dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi pada daerah yang memiliki program yang sama.

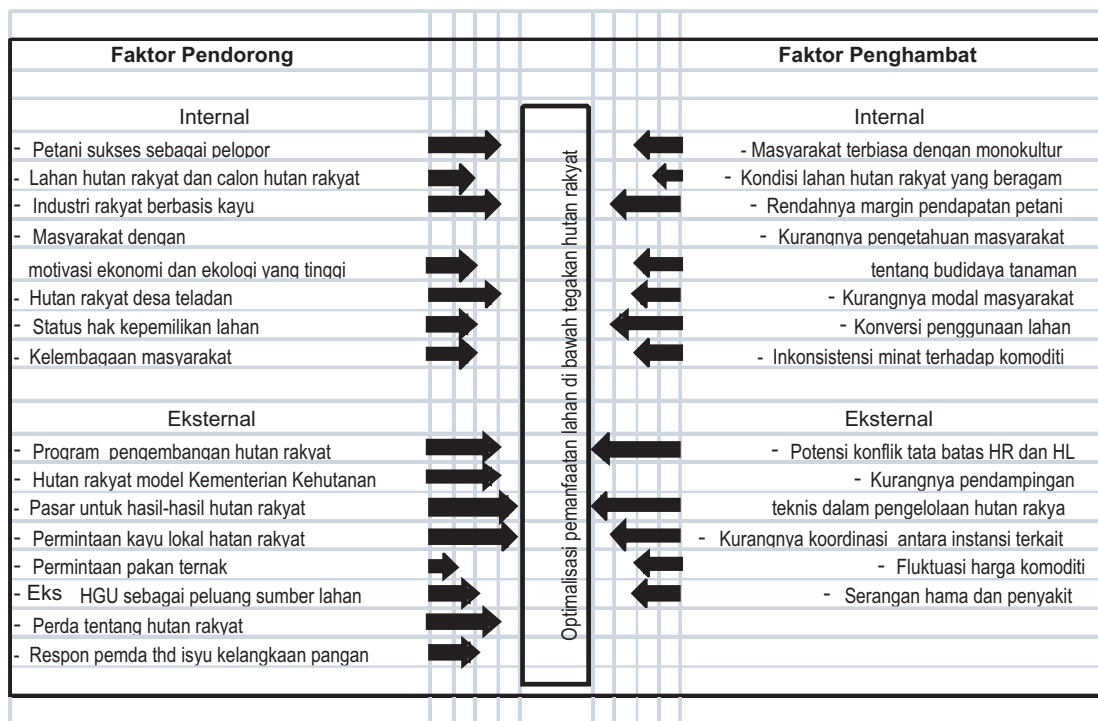
2. Analisis Medan Daya (*Force Field Analysis* = FFA)

Singer (2009) yang telah menerapkan FFA secara partisipatif menyatakan bahwa diskusi kelompok diperlukan untuk merumuskan: (a) cara memperkuat faktor pendorong terjadinya perubahan, dan (b) cara meminimalkan faktor penghambat terjadinya perubahan.

Dengan mengikuti langkah-langkah analisis FFA, faktor pendorong dan faktor penghambat

dapat ditampilkan sebagaimana Gambar 2. Kedua faktor tersebut diperhadapkan satu sama lain dalam pengaruhnya terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan, yakni optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat. Besarnya pengaruh faktor digambarkan dengan anak panah dengan panjang berbeda sesuai dengan peringkat dalam analisis EFAS-IFAS, mulai dari 1 sampai dengan 4. Faktor pendorong merupakan gabungan dari faktor strategis eksternal peluang dan faktor strategis internal kekuatan.

Total nilai faktor pendorong diperoleh dari penjumlahan peringkat faktor pendorong, sebesar 39. Sedangkan faktor penghambat merupakan gabungan dari faktor strategis eksternal ancaman dan faktor strategis internal kelemahan. Total nilai faktor penghambat diperoleh dari penjumlahan peringkat faktor penghambat sebesar 30. Total nilai faktor pendorong lebih besar daripada total nilai faktor penghambat menunjukkan bahwa program optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat dapat dilaksanakan dan dikembangkan dengan baik.



Gambar 2. Ilustrasi pengaruh faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat

Figure 2. The illustration of driving and restraining factors in optimization of land utilization under the private forest's stand

Ukuran gambar anak panah pada Gambar 2 yang mewakili kekuatan faktor pendorong dan faktor penghambat bervariasi dari yang pendek (lemah), sedang (rata-rata), sampai dengan panjang (sangat kuat). Semakin kuat faktor pendorong akan semakin melemahkan pengaruh faktor penghambat, sehingga program yang dipengaruhi kedua faktor tersebut, dalam hal ini optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat, akan semakin mudah dikembangkan.

Berdasarkan Gambar 2 faktor pendorong yang perlu diperkuat posisinya adalah lahan hutan rakyat dan calon hutan rakyat, status hak kepemilikan lahan, eks HGU sebagai peluang sumber lahan, dan kelembagaan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang perlu diperkecil pengaruhnya adalah konversi penggunaan lahan, potensi konflik tata batas hutan rakyat dan hutan lindung, kurangnya pendampingan teknis dalam pengelolaan hutan rakyat, dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan model matriks internal-eksternal, dengan jumlah nilai IFAS = 2,87 dan nilai EFAS = 3,12; maka program optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat berada pada kategori "growth" (pertumbuhan). Sedangkan strategi yang sesuai adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal dengan cara memperluas kegiatan di masyarakat dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi pada daerah yang memiliki program yang sama.
2. Strategi optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat dapat memperkuat faktor pendorong internal, berupa lahan hutan rakyat, calon hutan rakyat, status hak kepemilikan lahan, dan kelembagaan masyarakat. Di samping itu, memperkuat faktor pendorong eksternal, yaitu eks lahan HGU sebagai peluang sumber lahan. Selanjutnya,

memperkecil pengaruh faktor penghambat internal, yaitu konversi penggunaan lahan dan faktor penghambat eksternal, yaitu potensi konflik tata batas hutan rakyat dan hutan lindung, kurangnya pendampingan teknis dalam pengelolaan hutan rakyat dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait.

B. Saran

Diperlukan pendekatan multipihak antara masyarakat, instansi teknis terkait, dan dunia usaha dalam mengelola faktor-faktor optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan, yaitu: status dan kondisi lahan, minat masyarakat, program pendampingan, dan permintaan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani W, 2002. Optimalisasi Pemanfaatan lahan Usahatani Pola Agroforestri. Jurnal Hutan Rakyat. Pusat Kajian Hutan Rakyat. Fakultas Kehutanan UGM.

Badan Litbang Kehutanan dan Unhas. 1997. Studi pengembangan hutan rakyat wilayah Sulawesi Selatan dengan pendekatan SSEKI. Laporan Akhir. Kerjasama Badan Litbanghut dengan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas. Ujung Pandang.

Dinas Kehutanan, 2002. Rencana Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba 2002 - 2005. Bulukumba.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 2004. Statistik Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

Dinas Komunikasi Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Barru, 2006. Kabupaten Barru berpeluang menjadi lumbung benih. http://www.barru.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=26. Diakses 6 Januari 2010.

Edwin, 2008. Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan. <http://MakassarTerkini.com>.

FAO. 1996. *World Food Summit*, 13-17 November 1996. Rome, Italy: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.

Hendra, 2008. Konsep ketahanan pangan. <http://ajangberkarya.wordpress.com/2008/05/20/konsep-ketahanan-pangan/>

Kartasubrata J, 1991. Agroforestri. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.

Koran Jakarta, 2009. Budidaya tanaman jati makin diminati warga. <http://dhi.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=15991>. Diakses 5 Januari 2010.

Morgan, Royston. 2008. "How to Do a Force Field Analysis - The Seven Steps." *How to Do a Force Field Analysis - The Seven Steps EzineArticles.com*. <http://ezinearticles.com/?How-to-Do-a-Force-Field-Analysis---The-Seven-Steps&id=1752747>

Singer, Paula M. 2009. The Infopeople Project dalam Leading Change Winter, supported by the U.S. Institute of Museum and Library Services. California. http://infopeople.org/training/past/2009/bls_leading_change/ex3_force_field.pdf

Supriadi, D. 2002. Pengembangan hutan rakyat di Indonesia. Jurnal Hutan Rakyat. Pusat Kajian Hutan Rakyat. Fakultas Kehutanan UGM.

Susatijo, B. 2008. Hutan sebagai salah satu alternatif lumbung pangan. Majalah Surili Vol.45/No.2/Tahun 2008.

Usman, M. 2001. Memposisikan hutan rakyat sebagai aktualisasi ekonomi kerakyatan. Makalah hutan rakyat disampaikan pada seminar MPI Reformasi di Riau.

		TOTAL NILAI FAKTOR STRATEGIS INTERNAL		
		3,0	2,0	1,0
TOTAL NILAI FAKOR STRATEGIS EKSTERNAL	4,0	KUAT	RATA-RATA	LEMAH
	TINGGI	I PERTUMBUHAN	II PERTUMBUHAN	III PENCIUTAN
	3,0			
	MENENGAH	IV STABILITAS	V <u>PERTUMBUHAN</u> STABILITAS	VI PENCIUTAN
	2,0			
	RENDAH	VII PERTUMBUHAN	VIII PERTUMBUHAN	IX LIKUIDASI
	1,0			

Sumber (*Source*) : Wheelen (1995) dalam Rangkuti (2008)

Source : Wheelen (1995) in Rangkuti (2008)